

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 memiliki arti yang sangat penting dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga berpedoman kepada perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat tentang permasalahan, dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Hasil dari analisis tersebut kemudian diangkat untuk dapat menentukan isu strategis yang menjadi dasar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan. Selain itu dalam Renstra Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga juga memuat tentang landasan hukum, telaah Renstra K/L, dan rancangan program untuk periode 2016-2021.

Diharapkan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mampu memberikan gambaran capaian 5 tahun ke depan dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut akan memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga selama 5 tahun ke depan.

Tanjung Pati, 14 Desember 2018

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Lima Puluh Kota

Hj. Nengsih, S.Pd,M.Pd
NIP.19630311 198303 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 111 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARPORA	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Parpora	13
2.2 Sumber Daya	22
2.3 Kinerja Pelayanan	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	33

BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARPORA..	34
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Parpora	34
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	39
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI	: RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN ...	54
BAB VI	: KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	60
BAB VII	: PENUTUP	62

DAFTAR TABEL.....	Hal
Tabel II.1	Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin 22
Tabel II.2	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin 23
Tabel II.3	PNS yang mengikuti Diklat Penjurusan 23
Tabel II.4	Sarana dan Prasarana Dinas Parpora 24
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Parpora Tahun 2011-2015 29
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Parpora Tahun 2011-2015..... 31
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Parpora Tahun 2016-2021..... 49
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 51
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Parpora Tahun 2016-2021..... 56
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Parpora yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk periode 5 (lima) tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, berpedoman kepada Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021, yang bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

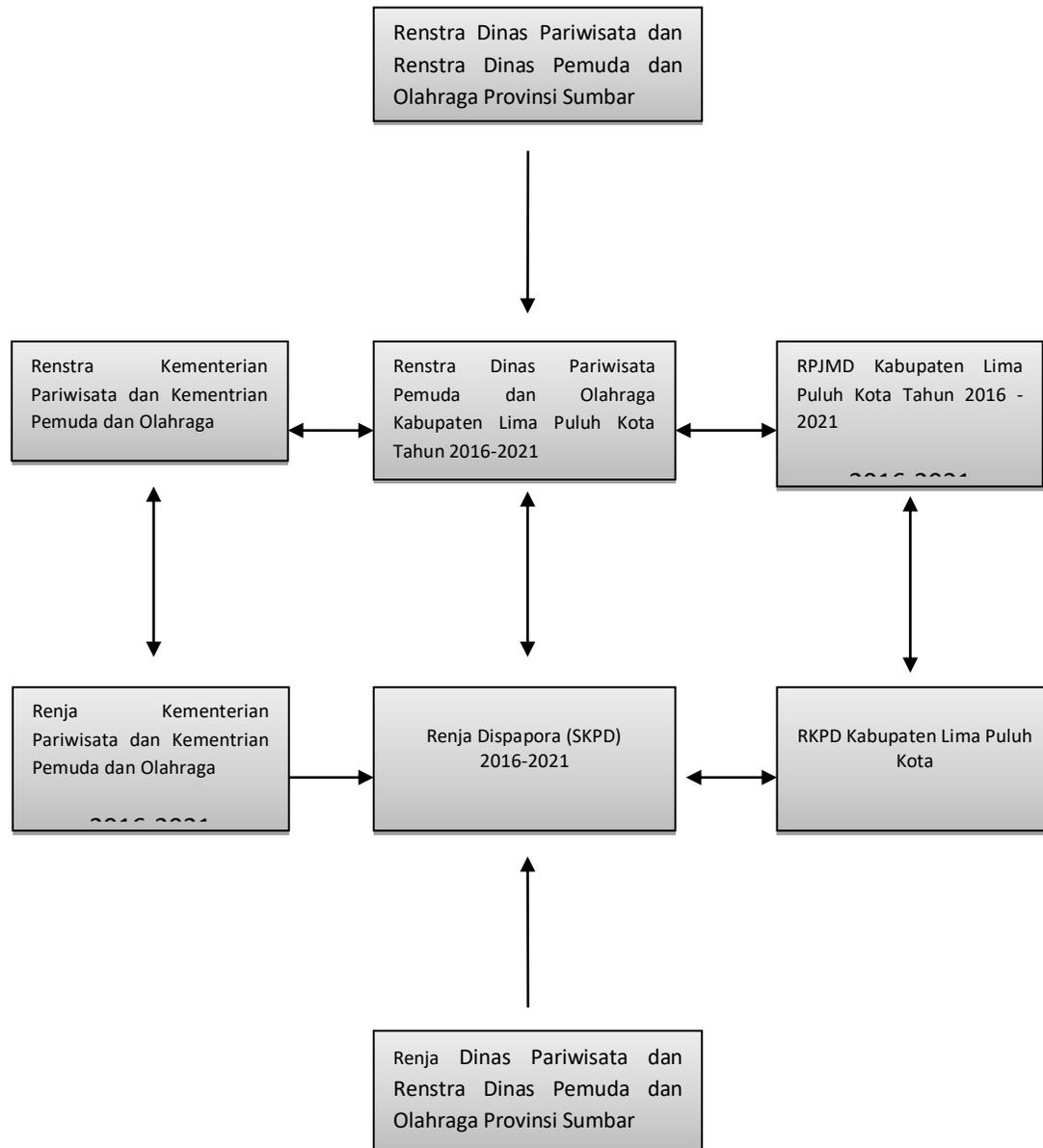
Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2. Penyusunan rancangan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4. Penetapan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 menyelaraskan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Disamping itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga propinsi Sumatera Barat, seperti pada gambar

Gambar 1 : Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan



1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2016-2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP , RPJMD dan RKPD
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini agar dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh insan pariwisata, pemuda dan olahraga. Hal ini berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk menyediakan acuan dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat di dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang sesuai dengan

aspriasi dan kebutuhan masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lain dari Renstra ini adalah meningkatkan koordinasi, sinergitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung keseluruhan proses pembangunan sektor pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Propinsi, investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

1. 4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD periode I - 7 sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Memuat penjelasan umum tentang struktur organisasi Disparpora serta uraian tugas pokok dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini memuat penjelasan singkat mengenai macam sumber daya yang dimiliki Dinas Parpora dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target Renstra PD periode sebelumnya.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pada bagian ini di kemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, di paparkan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan

PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu setrategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Bagian ini mengemukakan factor penghambat dan faktor pendorong pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi / Kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini di kemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari implikasi RT/RWserta impliksai dari KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan PD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pada Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga , maka Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian keuangan;
 - 3) Sub Bagian program dan pelaporan.
- c. Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
 - 3) Seksi Kemitraan dan kerjasama antar Lembaga.
- d. Bidang pemuda, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Pengembangan Organisasi kepemudaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Kompetensi Kepemudaan;
 - 3) Seksi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda.

- e. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Olah raga Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Olah raga Prestasi;
 - 3) Seksi Pengembangan Olah raga Rekreasi dan Tradisional.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan Sumber daya Manusia, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
 - 3) Seksi Pendataan dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana teknis;
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas dan Fungsi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.

Tugas, fungsi dan uraian tugas Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut

1). Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata pemuda dan olahraga

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2). Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumahtangga dinas , ketatausahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordiniran penyusunan dan perumusan program kerja dinas;

- b. Pengkoordiniran penyusunan dan perumusan rencana anggaran dinas meliputi rencana anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan serta rencana penerimaan dari sumber penerimaan di bidang pariwisata pemuda dan olahraga;
- c. Pengelolaan pelayanan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan dan surat pertanggungjawaban;
- f. Pendayagunaan serta peningkatan mutu sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dinas;
- g. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- i. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran pembangunan pada Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

3). Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang kepariwisataan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan;
- b. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pengembangan kepariwisataan;
- c. Pengumpulan dan penginventarisan data kepariwisataan kabupaten sesuai standard nasional;
- d. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- f. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata ;
- h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas

4). Kepala Bidang Pemuda

Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang kepemudaan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan keserasian pemuda, peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. Pelaksanaan koordinasi , pembinaan dan pemberdayaan bidang pemuda;
- c. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan bidang pemuda;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dan lembaga non pemerintah di bidang pemuda;
- e. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan kemampuan kepemimpinan , kepeloporan, keterampilan dan kewirausahaan pemuda
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan , pemberdayaan dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga dan organisasi kepemudaan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi program peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda (lmtaq) dan Ilmu Pengetahuan (lptek) pemuda;
- i. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan generasi muda;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5). Kepala Bidang Olahraga

Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Olahraga

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi serta olahraga rekreasi dan tradisional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga;
- c. Penghimpunan peraturan perundang – undangan mengenai keolahragaan;
- d. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan serta penilaian keolahragaan;
- e. Pengkoordinasian kerjasama dengan berbagai organisasi terkait tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan keolahragaan, pemecahan permasalahan, pelatihan, pembibitan, dan pembentukan klub / kelompok olahraga usia dini, olahraga prestasi, kebugaran jasmani, rekreasi dan tradisional;
- f. Pengusulan pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga yg berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan rekomendasi pemberian bantuan dan dukungan bagi pelaku olahraga;

- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kompetisi / kejuaraan olahraga;
 - i. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat dalam keolahragaan ;
 - j. Penginventarisan dan mengolah data untuk menyusun profil dan statistik keolahragaan skala kabupaten;
 - k. Pelaksanaan Monitoring ,evaluasi dan pelaporan kinerja keolahragaan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas.
- 6). Kepala Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan Sumber daya Manusia

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana teknis bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- c. Penganalisaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pengaturan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap Sarana, Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Sarana Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

2.1 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 40 orang PNS 40 orang (1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 19 orang staf

a. Pendidikan / Kepemilikan Ijazah

Tingkat pendidikan / kepemilikan Ijazah pegawai pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai tertera pada Tabel II.1 berikut ini:

Tabel II-1 : Tingkat pendidikan berdasarkan jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	2	1	3
2	S1	8	11	19
3	Diploma (D2)	1	-	1
4	Diploma (D3)	2	5	7
5	Diploma (D4)	1	-	1
6	SMU/SMK	5	3	8
7	SLTP	1	-	1
	JUMLAH			40

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2017

b. Pangkat/Golongan Ruang

Tabel II-2 : Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan berdasarkan jenis Kelamin.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	1	1	2
2	Pembina (Gol. IV/a)	2	1	3
3	Penata Tingkat I (Gol. III/d)	7	8	15
4	Penata (Gol. III/c)	4	6	10
5	Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b)	1	2	3
6	Penata Muda (Gol. III/a)	1	4	5
7	Pengatur Tingkat I (Gol. II/d)	-	-	-
8	Pengatur (Gol. II/c)	2	-	2
9	Pengatur Muda Tk I (Gol. II/b)	1	-	1
10	Pengatur Muda (Gol. II/a)	-	-	-
11	Juru Tk.I (Gol. I/d)	-	-	-
12	PTT		1	1
	TOTAL	19	21	40

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2017

c. Diklat Penjenjangan

Tabel II - 3 : PNS yang mengikuti Diklat penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Adum/Diklat Pim .IV	8
2	SPAMA/Diklat Pim III	2
	TOTAL	10

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat ini menempati Gedung Esk Dinas Pertambangan dan Energi di Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas – tugas rutinnya , Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki sarana prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel II – 4 : Sarana dan Prasarana Dinas Parpora

No .	Nama/Jenis Barang	Jumlah	No .	Nama/Jenis Barang	Jml
	TANAH			Alat Kantor & Rumah tangga	
1	Tanah Rest Area	20.000 M2	1	Meja Biro	28
2	Tanah Aka Barayun	26.370 M2	2	Meja ½ Biro	43
3	Tanah Sarasah Bunta	10.000 M2	3	Kursi Sofa	4
4	Tanah Medan Bapaneh	4.856 M2	4	Kursi Putar	43
			5	Kursi biasa	27

	BANGUNAN & GEDUNG		6	Kursi Plastik	150
1	Bangunan Fasilitas Wisata di Objek Wisata	36	7	Branksas	2
2	Bangunan Fasilitas Wisata di komplek Rest Area	11	8	Filling Kabinet	4
3	Bangunan di Komplek Medan Nan Bapaneh	6	9	Timbangan	1
4	GOR Singa Harau	1	10	X Banner Pariwisata	6
			11	Lemari Arsip	6
	KENDARAAN		12	Lemari Buku	3
1	Kendaraan Roda 4	6	13	Lemari Pajang/ etalase/kaca	6
2	Kendaraan roda 2	21	14	Mesin Tik	5
			15	Wireless	1
			16	UPS	5
			17	Komputer	6
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA				
18	Printer	20	35	Toa Megaphone	1
19	Laptop	15	36	Gorden	1
20	Kipas Angin	7	37	Stabilisator	1
21	Mesin pompa Air	1	38	Dispenser	1

22	Mesin Potong Rumput	6	39	AC	1
23	Tong sampah	6	40	Genset	1
24	White Board	4	41	Gerobak	2
25	Scanner	1	42	DVD External	2
26	Screen / layar	1	43	Billboar pariwisata	1
27	Vacum Cleaner	2	44	AC Mobil BA 2766 C	1
28	Televisi	2	45	Tape mobil	1
29	Kulkas	1	46	Hardisk Fortable	4
30	Kompor Gas	1	47	Proyektor	3
31	Tabung Gas	1	48	Karpet	5
32	Magiccom	2	49	Mesin Tik Elektronik	1
33	DVD Player	1	50	Rak surat	1
34	Net Book	2			
	JARINGAN/INSTALASI			ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	
1	Instalasi Listrik	6	1	Camera	2
2	Jaringan Internet	1	2	Camera Digital	3
3	Jaringan telepon	1	3	Handycam	2
4	Jaringan Faximile	1	4	Sound System lengkap	1
5	Jaringan TV Kabel	1	5	Toa Megaphone	1
			6	Mesin Faximile	1
			7	Telefon	1
			8	Orgen	1

			9	Acordion	1
	ASSET TETAP LAINNYA				
1	Tangga penggerak bendera	1	11	Alat Musik Gandang	4
2	Mimbar Upacara	1	12	Rak Talempong	1
3	Gawang sepak bola mini	1	13	Rak Canang	1
4	Jaring Bola kaki	1	14	Maket Lembah Harau	1
5	Komedi Putar	1	15	Maket Taman Megalitik	1
6	Peta Objek Wisata	1	16	Pakaian Penganten	4
7	Setting satwa	3	17	Pakaian uni uda	4
8	Patung Hewan	3	18	Patung Pajang	2
9	Alat Musik Talempong	40	19	Baju Tari	21
10	Alat Musik Canang	10	20	Baju Pemusik	8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa kinerja pelayanan instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pelayanan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan suatu instansi digunakan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan harus memuat kategori : a. Masukan (Input), b. Keluaran (Output), c. Hasil (Outcome), d. Manfaat (Benefit), dan e. Dampak (Impact). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias.

Interpretasi yang mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut disajikan dalam **Tabel T-C.23** berikut ini dimana hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya

Sedangkan untuk interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya disajikan dalam penyajian **Tabel T-C.24** berikut ini, dimana Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja :

- a. Masih rendahnya sumber daya pariwisata , sementara Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki objek wisata yang tersebar di 13 Kecamatan.
- b. Masih kurangnya pembinaan terhadap pemuda dalam hal berwirausaha serta pemahaman tentang bahaya narkoba.

- c. Masih kurangnya pembinaan olahraga di sekolah-sekolah serta di masyarakat.

Disamping hambatan-hambatan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa tantangan atau peluang yang bisa diterapkan dalam peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata yang meliputi Sumber Daya Manusia, serta sarana prasarana pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan.
- b. Meningkatkan perhatian terhadap pemuda dalam hal kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan serta memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c. Menggalakkan serta membina olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga tradisional dan rekreasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian serius atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 1 urusan wajib yaitu Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta 1 urusan pilihan yaitu kepariwisataan. Beberapa Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan tersebut tergambar pada Tabel T-B.35 sebagai berikut :

Tabel T-B. 35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan untuk bersaing di pasar regional dan global	Status Destinasi Wisata Unggulan yang merupakan Taman Wisata Alam (TWA)	Belum adanya kerjasama antara pemerintah Kab. Lima Puluh Kota dengan KSDA
		Masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata	Pemerintah Daerah belum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi
		Belum termanfaatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata yang menguasai IT
2	Masih rendahnya kreatifitas dan produktivitas pemuda	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda	Kurangnya peluang untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar
			Kurangnya kegiatan pelatihan pemuda dan kewirausahaan bagi pemuda
		Sedikitnya organisasi pemuda yang aktif menjalankan organisasinya	Minimnya sarana prasarana organisasi kepemudaan di Nagari
		Maraknya Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika di kalangan pemuda	Kurangnya penyuluhan dan kesadaran pemuda tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika di kalangan pemuda
3.	Belum maksimalnya pencapaian prestasi olahraga pada event nasional, regional	Masih rendahnya pembinaan dan pembibitan atlet olahraga prestasi, pendidikan dan tradisional	Atlit berbakat dan berprestasi tersebar di seluruh kecamatan sehingga sulit untuk memberikan pembinaan rutin
			Kurangnya dukungan masyarakat (orang tua) dalam pembinaan karena khawatir latihan olahraga akan mengganggu pelajaran sekolah
		Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Hanya terdapat 1 GOR sebaga sarana latihan GOR yang ada tidak memadai dan tidak representative untuk event yang besar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota yang termaktub dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, maka terdapat peranan penting dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang kemudian dihubungkan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Parpora Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental;
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri;
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Investasi dan kemudahan berusaha;
5. Penguatan ekonomi kerakyatan;
6. Akselerasi pembangunan sumberdaya manusia;
7. Reformasi birokrasi;
8. Penguatan nagari;
9. Penataan ruang dan kawasan strategis;
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diemban oleh Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah MISI 2 dan MISI 3 yaitu :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Parpora dapat pula memberikan gerakan positif pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian. Potensi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan potensi yang tidak dapat dikesampingkan, maka disinilah tugas dan peranan penting dari Dinas Parpora.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terdapat 11 agenda prioritas penting untuk mempercepat pencapaian visi dan misi tersebut. Jika kita kaitkan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Budpaarpora, maka sesuai dengan RPJMD 2016-2021, agenda prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif dan agenda penataan ruang dan kawasan strategis terutama di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga, dapat didukung oleh Dinas Parpora. Oleh karena itu, Dinas Parpora terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Status Destinasi Wisata Unggulan yang merupakan Taman Wisata Alam (TWA
2. Masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata

3. Belum termanfaatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda
5. Sedikitnya organisasi pemuda yang aktif menjalankan organisasinya
6. Maraknya Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika di kalangan pemuda
7. Masih rendahnya pembinaan dan pembibitan atlit olahraga prestasi, pendidikan dan tradisional
8. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat

Renstra Kementerian pariwisata ditetapkan melalui Peraturan menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Di dalamnya tertuang Visi Kementerian Pariwisata yang menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni : **“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar**

Internasional sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”. Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 9 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019.

Sejalan dengan substansi Renstra Kementerian tersebut, Dinas Pariwisata propinsi Sumatera Barat memiliki beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya .

Faktor Penghambat pengembangan kepariwisataan di Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata;

Adapun faktor Pendorong pengembangan pariwisata di Sumatera Barat adalah :

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata
3. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
4. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan
5. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2016-2021 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. yang salah satu tujuannya adalah

menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional. Sedangkan sasaran strategisnya salah satunya adalah meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut.

3.3.2 Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar

Sasaran pembangunan Kementerian Pemuda dan Olahraga, adalah Pemuda Maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan,

Proses penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda dan memberikan pembekalan agar pemuda mampu untuk mengambil sikap terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Proses pemberdayaan dilakukan untuk membangkitkan

potensi yang dimiliki sehingga mampu berperan aktif dan terlibat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan potensi yang dimilikinya, pemuda memasuki fase berikutnya yaitu proses pengembangan, dimana kompetensi pemuda dilengkapi dengan pengembangan jiwa keteladanan, jiwa kemandirian dan jiwa kepeloporan untuk menjadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Di bidang olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasarannya untuk mewujudkan Atlet Elit Dunia. Atlet yang mampu membela kebanggaan bangsa dan negara di kompetisi tingkat internasional. . Selain prestasi secara teknis, atlet perlu dibekali dengan pembentukan mental dan karakter atlet sehingga mewujudkan atlet yang berkelas dunia tetapi tetap memiliki karakter dan budaya Indonesia.

Selanjutnya telaahan terhadap Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat , diawali dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021:

“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN YANG BERKARAKTER, MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING SERTA KEOLAHRAGAAN YANG MEMBUDAYA DAN BERPRESTASI”

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat yang dituangkan dalam urusan permasalahan pembangunan daerah, sehingga membutuhkan keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk berperan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai tupoksinya, dengan strategi-strategi yang disusun berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menetapkan adanya kepemudaan yang berkarakter. Berkarakter dalam lingkup Kepemudaan mengandung arti kader pemuda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan. Pemuda yang berkarakter tersebut tentunya harus memiliki pikiran yang **Maju**, memiliki jiwa **Mandiri** dan mampu **berdaya saing**.

Dalam bidang Olahraga ditetapkan tujuan mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi melalui olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional dengan cara peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya terdiri dari dua bentang alam darat yang berupa kawasan dataran untuk pengembangan permukiman dan kawasan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sedangkan isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan destinasi berbasis kearifan lokal
2. Pengembangan IKK Sarilamak Sebagai Pusat Pemerintahan, Sosial Budaya dan Ekonomi

Dari Isu-isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Infrastruktur menyangkut akses menuju objek wisata yang terdapat di Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Sarilamak masih belum memadai
2. Walaupun berfungsi sebagai gerbang timur propinsi Sumatera Barat, Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata terutama penginapan, pasar wisata, pertunjukan seni budaya , wisatawan dari Propinsi Riau menuju Propinsi Sumatera Barat atau sebaliknya, hanya singgah sebentar di Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal pada sektor kepariwisataan disebabkan sulitnya pembebasan lahan.
4. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap bahaya narkoba

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil bupati Terpilih, Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga propinsi Sumbar, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Kawasan Wisata unggulan berada pada Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Potensi Daya Tarik wisata baik alam maupun buatan, belum semua terkelola dengan baik ,

3. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan.
4. Peningkatan penataan Infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
6. Peningkatan dan pengembangan program kepemudaan yang berkesinambungan
7. Peningkatan partisipasi dan kompetensi pemuda dalam berwirausaha
8. Peningkatan pembinaan pemudaberprestasi.
9. Peningkatan kegiatan pencarian bibit atlet pelajar berbakat termasuk penyandang disabilitas.
10. Peningkatan kualitas tenaga keolahragaan (pelatih dan wasit)
11. Peningkatan pembangunan sarana prasarana GOR

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis di atas adalah tidak teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pembangunan dengan baik, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga kebijakan dan program pembangunan yang disusun tidak baik pula. Disamping itu data yang tersedia tidak akurat, sehingga tidak mampu memberikan penjelasan dan informasi yang memadai mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi Pada sisi

lain mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat belum begitu diperhatikan dalam menetapkan program dan kegiatan .

Merujuk kepada gambaran pelayanan yang telah disebutkan di atas, proyeksi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, pemuda dan Olahraga ke depan ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu perencanaan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata, pemuda dan olahraga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang mangacu kepada visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Dalam merumuskan tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi-misi kepala daerah yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah
2. Disusun berdasarkan issue-issue strategis
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Strategi merupakan langkah-langkah berisi program-program sebagai sarana prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi issue strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Tabel di bawah ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang Mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa		
MISI II	Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Objek Pariwisata unggulan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Dunia Usaha/Lembaga 5. Pengembangan Daerah tujuan Wisata
		Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata 2. Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri 3. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
		Meningkatkan Pengembangan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 2. Pasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

MISI III	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi peningkatan kreatifitas Pemuda dan prestasi Olahraga	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Peningkatan keimanan dan Ketaqwaan di Kalangan Pemuda
		Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	Pendataan Potensi Kepemudaan
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan
			Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan
			Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan Pemuda
			Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
		Pelatihan dan pelaksanaan Paskibra	
	Meningkatnya Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pemuda	Pelatihan Kewirausahaan	
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Narkoba	
	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Olahraga
		Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dala Olahraga
			Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah
			Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
			Pembinaan cabang olahragaprestasi tingkat daerah
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani			
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan jumlah kualitas kualitas serta kompetensi peneliti, praktisi dan tehni olahraga
			Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
			Pengembangan Olahraga Rekreasi
			Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
			Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi
		Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
			Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana prasarana olahraga
			Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021 ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan rutin maupun pembangunan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat atau daerah .

Rencana program yang disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga digambarkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Program-program ini diperoleh dari berbagai masukan, terutama usulan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Program-program Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah, serta merujuk pada arah pembangunan RPJP pada periode RPJM III. Dengan demikian diharapkan program-program ini dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 serta Rekapitulasi kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk RPJMD Kab. Lima Puluh Kota.

Matrik Program dan Kegiatan ditampilkan berdasarkan urusan pemerintahan, dimana pada setiap urusan pemerintahan dari urusan wajib sampai urusan pilihan yang ditampilkan secara terjabar berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 – 2021 dalam dilihat pada Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
5. Penyediaan alat tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan Logistik Kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
13. Pengadaan peralatan gedung Kantor
14. Pengadaan mebeleur

15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20. Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
22. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

23. Pendataan Potensi Kepemudaan
24. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Bagi Pemuda

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

25. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
26. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
27. Lomba Kreasi dan Karya tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda
28. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

29. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka

Program Peningkatan upaya penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

30. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

31. Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

32. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

33. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu

Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

34. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga

35. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

36. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

37. Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani

38. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

39. Pemassalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

40. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi

41. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Pemyandang Cacat

42. Pengembangan Olahraga Rekreasi

43. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

44. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

- 45. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 46. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga
- 47. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Urusan Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 48. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
- 49. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- 50. Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 51. Pengembangan objek pariwisata unggulan
- 52. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
- 53. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

- 54. Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
- 55. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
- 56. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang Pariwisata
- 57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka ditetapkan Indikator – indicator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan arah kebijakan dan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Rencana strategis berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga . Dokumen perencanaan ini disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, yang juga memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Lima Puluh Kota ini disusun, diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota


Hj. Nengsih, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630311 198303 2 003

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Kinerja				
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1			2	3	5	7	8	10	12	14	16
1	Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	3.700	3.900	4.200	4.200	6.000	8.000
				Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	270.000	378.000	400.000	420.000	500.000	550.000
		Persentase peningkatan PAD dari retribusi tiket masuk objek wisata		Jumlah pelaku industri pariwisata yang produktif	buah	8	8	35	40	60	75
				Jumlah kelompok sadar wisata aktif	buah	9	9	29	29	32	39
				Cakupan pelaksanaan event-event pariwisata di dalam dan di luar daerah	kali	1	3	4	8	10	10
2	Optimalisasi peningkatan kreatifitas dan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha	Meningkatkan kreatifitas pemuda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	bh	30	30	30	36	39	40
				Jumlah wira usaha muda yang aktif	orang/ kel	30	30	50	55	58	70
		Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang meraih medali	Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi meraih medali	cabang	7	7	7	21	23	25

Tanjung Pati, Oktober 2019
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
kabupaten Lima Puluh Kota

Hj. Nengsih S.Pd,M.Pd
NIP. 19630311 198303 2 003

Target Akhir Renstra
20
8.000
550.000
75
39
10
40
70
25

aga

RENCANA F

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	
							Target	Rp.
1		2		4	5	6		7
		Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP B		01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang diadakan		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon, fax dan internet		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB honorarium yang dibayarkan		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang diadakan dan retribusi sampah		
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan		
					Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/tabloid yang disediakan		
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum yang disediakan untuk rapat dan tamu		
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas yang dilakukan		
					02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		

						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan		
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		
						Pengadaan mebeleur	Jumlah moubiler yang diadakan		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara		
						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab yang dilaksanakan		
					03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur		
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel pakaian dinas yang diadakan		
					04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM aparatur		
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		
					05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat perkembangan sistem pelaporan		
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian & Asset yang disusun		
						Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		
Optimalisasi Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha	Meningkatnya Kreatifitas Pemuda		1	18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
			Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase meningkatnya pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda	

			Peningkatan keimanan dan Ketaqwaan di Kalangan Pemuda	Jumlah pemuda yang ikut bimtek Iman dan Taqwa					
		01	Pendataan Potensi Kepemudaan	Terlaksananya pendataan potensi pemuda					
1	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif					
		01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Seleksi pemuda yang dilaksanakan					
		02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang mengikuti diklat					
		06	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan Pemuda	Jumlah lomba yang dilaksanakan					
		09	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring yg dilakukan					
		10	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibra	Jumlah pekerjaan dalam pembinaan paskibra					
			Jumlah Wirausaha muda yang aktif						
1	19	19	Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pemuda	Jumlah Wirausahawan muda yang aktif					
		01	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan					
1	18	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Presentase penurunan penyalahgunaan Narkoba di					
		01	Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Terlaksananya penyuluhan Narkoba di 13 kecamatan					
Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang meraih medali	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi meraih medali	1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi meraih medali		
			01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Olahraga	Jumlah pelatihan/tenaga olahraga yang mengikuti pelatihan				
			1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Tingkat Pelaksanaan pembinaan dan pemsarakatan olahraga		

					01	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dala Olahraga	Jumlah atlit berbakat yang teridentifikasi		
					02	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah	Jumlah atlit berbakat yang diidentifikasi pada cabang olahraga unggulan		
					03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlit berbakat yang dibina		
					05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Jumlah senam kesegaran Jasmani yang dilaksanakan		
					06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah kegiatan kompetisi yang dilaksanakan		
					08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi	Jumlah atlit dan tenaga olahraga yang diberi penghargaan		
					10	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jjumlah olahraga lanjut usia yang dilaksanakan		
					11	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dikembangkan		
					14	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah cabang Olahraga masyarakat yang dibina		
					18	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi	Jumlah cabang yang diikuti		
				1	18	21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	
						02	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah pekerjaan peningkatan sarpras OR yang	
						07	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah GOR yang dipelihara/PHL yang memelihara	
Optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah		2	04		Urusan Kepariwisata		
			Cakupan pelaksanaan event pariwisata di dalam dan di luar daerah	2	XX	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
						02	Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah Website yang dikelola pada Dinas Parpora	

Persentase peningkatan PAD dari retribusi tiket masuk objek wisata			05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri	Jumlah event promosi yang dilaksanakan di dalam dan di luar			
			07	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Jumlah buku data/paket data digital			
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik	2	XX	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisman dan wisnus		
			01	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah petugas K3 yang dipekerjakan, Jumlah penampilan Atraksi di Lembah Harau, Penyusunan Geopark LH			
			02	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata	Jumlah Pekerjaan Pembangunan Sarpras yang dilaksanakan			
			06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah Pekerjaan pengembangan OW yang dilaksanakan			
	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang aktif	2	XX	17	Program Pengembangan Kemitraan	Tingkat Pengembangan Kemitraan		
			04	Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah Kelompok sadar wisata yang aktif			
			05	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pertemuan koordinasi yang dilaksanakan			
	Jumlah pengusaha industri pariwisata yang aktif			07	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah pelaku industry pariwisata yang dilatih		
		08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah peserta festival kuliner				

Tabel T-C.27

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARPORA
Tahun 2016 - 2021

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 20120	
target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
8	9	10	11	12	13	14	15
33%	438.816	36%	917.539	50%	654.381	42%	850.695
12 bulan	3.168	12 bulan	4.800	12 bulan	4.800	12 bulan	6.240
12 bulan	46.128	12 bulan	50.340	12 bulan	60.540	12 bulan	78.702
12 bulan	154.150	12 bulan	208.400	12 bulan	228.400	12 bulan	296.920
12 bulan	18.090	12 bulan	8.285	12 bulan	27.616	12 bulan	35.901
12 bulan	27.871	12 bulan	22.654	12 bulan	27.871	12 bulan	36.232
12 bulan	44.549	12 bulan	5.945	12 bulan	49.054	12 bulan	63.770
12 bulan	7.000	12 bulan	7.380	12 bulan	8.200	12 bulan	10.660
12 bulan	7.500	12 bulan	3.110	12 bulan	5.000	12 bulan	6.500
12 bulan	7.200	12 bulan	8.550	12 bulan	11.500	12 bulan	14.950
12 bulan	46.760	12 bulan	37.650	12 bulan	36.400	12 bulan	47.320
12 bulan	76.400	12 bulan	560.425	12 bulan	195.000	12 bulan	253.500
33%	633.433	36%	237.868	40%	243.850	85%	1.271.380

1 unit kend roda 4, dan 3 unit kend roda 2	301.886		-	-	-	1 unit kend roda 4 dan 1 unit Bus pariwisata	800.000
Peralatan kantor	26.750	Peralatan kantor	33.500	Peralatan kantor	56.750	Peralatan kantor	150.000
1 paket	164.357	Moubiler kantor	-	Moubiler kantor	20.000	Moubiler kantor	75.000
1 tahun	15.000	1 tahun	98.000	1 tahun	58.000	1 tahun	120.000
1 tahun	114.640	1 tahun	95.900	1 tahun	95.900	1 tahun	115.080
1 tahun	10.800	1 tahun	10.468	1 tahun	13.200	1 tahun	11.300
	-	-	-	1 paket	193.000	1 paket	450.000
20%	50.950		-	30%	35.000	40%	50.000
63 stel	50.950	60 stel	-		35.000	70 stel	50.000
20%	30.000		-	30%	20.000	35%	30.000
5 orang	30.000		-	3 orang	20.000	5 orang	30.000
30%	23.000	40%	10.925	50%	24.000	60,0%	42.000
12 dokumen	23.000	12 dokumen	9.576	12 dokumen	17.000	14 dokumen	23.000
			-	1 dokumen	7.000	1 dokumen	7.000
		1 dokumen	1.349			1 dokumen	12.000
-	-	-	-	20%	54.954	30%	30.000

				30 orang	20.000	40 orang	30.000
			-	30 buku data	34.954		-
30	750.000	30	752.493	30	1.190.040	30	1.540.000
7 kegiatan	205.000	7 kegiatan	135.259	8 kegiatan	335.000	8 kegiatan	450.000
1 kali / 40 orang	15.000	2 kali / 50 orang	124.000	2 kali / 60 orang	215.000	3 kali / 90 orang	280.000
						1 kegiatan	100.000
		13 kec	15.325	13 kec	10.000	13 kec	10.000
4 kegiatan	530.000	4 kegiatan	477.859	4 kegiatan	630.000	4 kegiatan	700.000
25	344.000	35	113.775	39	200.000	45	230.000
100 orang	344.000	50 orang	113.775	60 orang	200.000	80 orang	230.000
20%	42.800	25%	56.049	30%	64.000	35%	150.000
30 orang	42.800	40 orang	56.049	40 orang	64.000	45 orang	150.000
30%	115.000	40%	133.000	50%	50.000	60%	150.000
50 orang	115.000	50 orang	133.000	30 orang	50.000	60 orang	100.000
75%	530.000		10.511.925		2.232.585		12.610.198

70%	25.000	75%	301.049	80%	150.000	85%	200.000
			126.710				
		60%	218.473	70%	300.000	80%	400.000
			25.524				
10 kegiatan	445.000	11 kegiatan	2.165.574	7 kegiatan	1.535.630	8 kegiatan	1.800.000
			118.408				
		70%	61.090	75%	54.550	80%	60.000
		2 kegiatan	119.083	2 kegiatan	82.430	2 kegiatan	198
3 kegiatan	60.000	3 kegiatan	602.275	3 kegiatan	109.975	3 kegiatan	150.000
		31 cabang Olahraga	6.773.739			31 cabang Olahraga	10.000.000
			3.146.306	1 paket	100	1 paket	100
60%	2.337.526	70%	2.932.448	78%	1.020.615	87%	1.000.000
60%	148.564,5	70%	213.858	78%	75.000	84%	150.000
55%	701.350	60%	1.371.246	70%	1.894.652	75%	1.880.000
100%	63.000						

1	638.350	3	1.312.622	4	1.772.360	8	1.880.000
		1 paket data digital	58.624	40 buku profil	122.292		
381.900	2.630.000	404.000	3.673.264	424.200	7.619.473	434.500	8.279.473
12 orang	167.000	12 orang / 26 kali atraksi wisata	404.074	13 orang / 12 kali atraksi wisata	840.000	13 orang / 52 kali atraksi wisata / 1 keg FGD GPLH	1.000.000
3 paket	2.463.000	5 paket	3.269.190	5 paket	6.779.473	5 paket	6.779.473
						2 paket	500.000
		40%	685.987	50%	484.082	60%	580.000
		9	128.591	11	390.082	10	468.098
12 kali	30.000					12 kali	30.000
30 orang	38.615	40 orang	278.396	40 orang	94.000	50 orang	100.000
79 nagari/18 kab. Kota	243.560	13 Kecamatan	279.000	79 nagari	390.082	79 nagari / 18 kab/kota	450.000

Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		
16	17	20	21	22	23
45%	1.105.904	50%	1.437.675	Disparpora	Disparpora
12 bulan	8.112	95%	10.546	Disparpora	
12 bulan	102.313	12 bulan	133.006	Disparpora	
12 bulan	385.996	12 bulan	501.795	Disparpora	
12 bulan	46.671	12 bulan	60.672	Disparpora	
12 bulan	47.102	12 bulan	61.233	Disparpora	
12 bulan	82.901	12 bulan	107.772	Disparpora	
12 bulan	13.858	12 bulan	18.015	Disparpora	
12 bulan	8.450	12 bulan	10.985	Disparpora	
12 bulan	19.435	12 bulan	25.266	Disparpora	
12 bulan	61.516	12 bulan	79.971	Disparpora	
12 bulan	329.550	12 bulan	428.415	Disparpora	
90%	712.164	90%	3.098.695	Disparpora	

1 unit kendaraan roda 4	390.000	10 unit kend roda 4 , 21 unit kend. Roda 2	1.491.886	Disparpora	
Peralatan kantor	60.000	Peralatan kantor	327.000	Disparpora	
Moubiler kantor	50.000	Moubiler kantor	309.357	Disparpora	
1 tahun	50.000	1 tahun	341.000	Disparpora	
1 tahun	149.604	1 tahun	571.124	Disparpora	
1 tahun	12.560	1 tahun	58.328	Disparpora	
1 paket	500.000	1 paket			
50%	50.000	60%	185.950	Disparpora	
70 stel	50.000	70 stel	185.950	Disparpora	
40%	50.000	50%	130.000	Disparpora	
5 orang	50.000	18 orang	130.000	Disparpora	
70%	54.000	153.925			
15 dokumen	32.000	104.576			
1 dokumen	10.000	24.000			
1 dokumen	12.000	25.349			
40%	80.000	50%	164.954	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota

40 orang	40.000	110 orang	90.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
30 buku data	40.000	60 buku data	74.954	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
39	1.250.000	40	5.482.533	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
8 kegiatan	50.000	8 kegiatan	1.175.259	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
3 kali / 100 orang	320.000	4 kali / 120 orang	954.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
2 kegiatan	120.000	3 kegiatan	220.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
13 kec	10.000	13 kec	45.325	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
4 kegiatan	750.000	4 kegiatan	3.087.859	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
50	260.000	55	1.147.775	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
100 orang	260.000	390 orang	1.147.775	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
40%	200.000	45%	512.849	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
100 orang	200.000	255 orang	512.849	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
70%	120.000	70%	568.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
90 orang	120.000	100 orang	518.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
	2.785.970	3 jenis keg	28.400.036	Disparpora	Dalam dan luar daerah

90%	225.000	90%	901.049	Disparpora	Dalam dan luar daerah
90%	500.000	90%	1.418.473	Disparpora	Dalam dan luar daerah
7 kegiatan	1.800.000	7 kegiatan	7.746.204	Disparpora	Dalam dan luar daerah
85%	75.000	85%	250.640	Disparpora	Kab. Lima Puluh
2 kegiatan	220	2 kegiatan	201.931	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
3 kegiatan	185.750	3 kegiatan	1.108.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
		1 tahun	16.773.739	Disparpora	Dalam dan luar daerah
1 paket	75	1 paket	3.146.581	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
90%	1.000.000	90%	8.290.589	Disparpora	Kab. Lima Puluh
90%	200.000	90%	787.423	Disparpora	Kab. Lima Puluh
80%	2.000.000	90%	7.603.332	Disparpora	Dalam dan luar daerah

10	2.000.000	14	7.603.332	Disparpora	Dalam dan luar daerah
455.000	9.029.473	2.099.600	31.231.683	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
13 orang / 52 kali atraksi wisata / 1 keg GPLH	1.250.000	13 orang / 52 kali atraksi wisata / 1 keg GPLH	3.661.074	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
5 paket	6.779.473	5 paket	26.070.609	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
2 paket	1.000.000	2 paket	1.500.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
70%	700.000	70%	2.633.653	Disparpora	Dalam dan luar daerah
9	561.718	39 kelompok	1.548.489	Disparpora	Dalam dan luar daerah
12 kali	30.000	36 kali	90.000	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
50 orang	110.000	210 orang	621.011	Disparpora	Kab. Lima Puluh Kota
79 nagari / 18 kab/kota	560.000	79 nagari / 18 kab/kota	1.922.642	Disparpora	Dalam dan luar daerah